

**MANAJEMEN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
OLEH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik**



**Diajukan Oleh:
DINDA AFFTITA
NIM.07011282126075**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

**MANAJEMEN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
OLEH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

DINDA AFFTITA

NIM.07011282126075

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 03 Maret 2025

Pembimbing

Dr. Lili Erina, M.Si.
NIP.196612301992032001



Mengetahui
Ketua Jurusan



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP.196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
MANAJEMEN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
OLEH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

DINDA AFFTITA

NIM.07011282126075

**Telah dipertahankan di depan penguji
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**


Pada tanggal Maret 2025

Pembimbing :

Dr. Lili Erina, M.si

NIP.196612301992032001

Tanda Tangan



Penguji :

Drs. Mardianto, M.Si

NIP. 196211251989121001

Tanda Tangan



**Riza Adelia Suryani, S.sos.,
M.Si**

NIP. 198902222023212044

Mengetahui,



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Afftita

NIM : 07011282126075

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Manajemen Aset Kendaraan Dinas Operasional oleh Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan
Palembang, 03 Maret 2025



Dinda Afftita
NIM. 07011282126075

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"I feel like the possibility of all those possibilities
being possible is just another possibility
that can possibly happen."*

-Mark Lee (NCT)

"Terima kasih sudah bertahan, Terima kasih sudah berjuang
Ternyata kau sekuat itu, Ternyata kau sekuat itu."

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orangtuaku Tercinta, Capli
Apriadi dan Hertini
2. Saudaraku, Diaz Adyatama
3. Orang-orang yang saya sayangi
4. Seluruh dosen dan pegawai FISIP
UNSRI
5. Teman-teman Ilmu Administrasi Publik
2021
6. Almamater kuning kebanggaan,
Universitas Sriwijaya
7. Diri saya sendiri

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the asset management of operational service vehicles in the Palembang City Government managed by the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Palembang City. This research departs from the problems that are still found in the process of inventorying, securing, and monitoring and controlling operational service vehicle assets. This research uses a qualitative approach with the concept of Asset Management Flow by Siregar (2004), which includes five main aspects: Asset Inventory, Legal Audit, Asset Valuation, Asset Optimization, and Asset Supervision and Control. Data were obtained through interviews, observations, and documentation studies. The results show that the management of operational service vehicle assets still faces coordination challenges between BPKAD as the manager and SKPD as the asset user. Therefore, increased synergy and coordination mechanisms between agencies are needed to optimize the utilization and control of regional assets.

Keywords: Asset, Management, BMD, Vehicle, Operational

Advisor,

Dr. Lili Erina, M.si

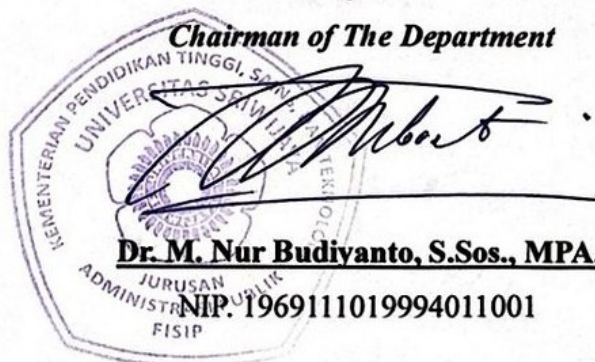
NIP.196612301992032001



Indralaya, 17 March 2025

Mengetahui

Chairman of The Department



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis manajemen aset kendaraan dinas operasional di Pemerintah Kota Palembang yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang. Penelitian ini berangkat dari permasalahan yang masih ditemukan dalam proses inventarisasi, pengamanan, serta pengawasan dan pengendalian aset kendaraan dinas operasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan konsep Alur Manajemen Aset oleh Siregar (2004), yang mencakup lima aspek utama: Inventarisasi Aset, Legal Audit, Penilaian Aset, Optimalisasi Aset, serta Pengawasan dan Pengendalian Aset. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset kendaraan dinas operasional masih menghadapi tantangan koordinasi antara BPKAD sebagai pengelola dan SKPD sebagai pengguna aset. Oleh karena itu, peningkatan sinergi dan mekanisme koordinasi antarinstansi diperlukan guna mengoptimalkan pemanfaatan dan pengendalian aset daerah.

Kata kunci: : Aset, Manajemen, BMD, Kendaraan, Operasional

Pembimbing,

Dr. Lili Erina, M.si

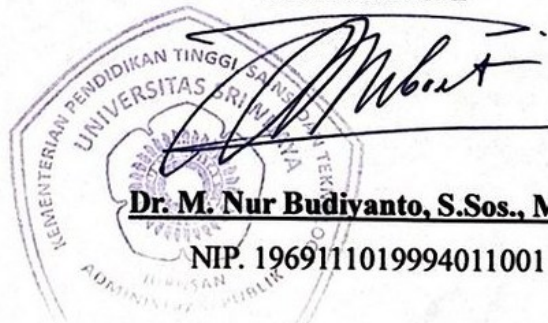
NIP.196612301992032001



Indralaya, 14 Maret 2025

Mengetahui

Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 1969111019994011001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa Skripsi dengan judul "Manajemen Aset Kendaraan Dinas oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang" dengan baik tanpa hambatan tertentu guna menyelesaikan studi di Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya.

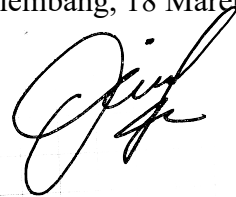
Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Kedua orang tua penulis, Bapak Capli Apriadi yang senantiasa memberi dukungan hingga penulis menyelesaikan studinya sampai sarjana dan Ibu Hertini, terimakasih atas kasih sayang, doa dan pengorbaannya yang tak terhitung sampai saat ini. Penulis juga mengucapkan rasa terimakasih kepada saudara penulis yaitu Diaz Adyatama yang selalu mendorong penulis agar menyelesaikan penelitian ini. Penyusunan Skripsi ini tidaklah lepas dari bimbingan serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Sriwijaya, Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., M.Si.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
3. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S. Sos., MPA.
4. Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M. Si selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik.
5. Dr. Lili Erina, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membantu, membimbing serta memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan selama mengenyam pendidikan dibangku perkuliahan
7. Admin Jurusan Ilmu Administrasi Publik Kampus Indralaya, Ita Permata Sari.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang selaku tempat penelitian yang telah memberikan izin dan kemudahan saat proses penelitian berlangsung.
9. Dinas Perhubungan dan Rumah Sakit BARI Kota Palembang, sebagai instansi tambahan dalam proses kelengkapan data penelitian.
10. Saudaraku, Diaz Adyatama yang senantiasa mendukung penulis untuk segera wisuda.
11. Anggi Faradiansyah, Mitha Miranda sahabat karib penulis yang sudah menemani penulis di berbagai kondisi selama menjalankan skripsi, selalu menjadi tempat penulis berkeluh kesah dan senantiasa memberikan semangat kepada penulis.
12. Suci Fitria Dewi, Adedia Paramadinanti, Hafifa Tulkhaira, Angra Aldora, Karina Meilia, Soleha Safitri, Lee Jenno, Lee Haechan, Lee Mark, Huang Renjun, Zhong Chenle, Park Jisung, selaku sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan serta masukan selama proses penyusunan skripsi.
13. Na Jaemin, rumah kedua penulis, tempat penulis pulang yang memberikan dukungan dan selalu meningkatkan rasa percaya diri penulis di saat penulis merasa kurang.

14. Sky Wongravee, Nani Hirunkit dunia baru penulis yang memberikan warna baru dalam perjalanan penulis, senantiasa memberikan rasa semangat dan bangkit kepada penulis di saat penulis kesulitan.
15. Teman-teman Jurusan Administrasi Publik Tahun 2021 yang senantiasa mendukung penulis.
16. Rekan-rekan mahasiswa serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas dukungan dan motivasinya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu selama penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran membangun yang diberikan sangat diharapkan untuk mencapai kesempurnaan skripsi ini.

Palembang, 18 Maret 2025



Dinda Affita

NIM. 07011282126075

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Landasan Teori	9
2.1.1 Pengelolaan Barang Milik Daerah	9
2.1.2 Definisi Manajemen	11
2.1.3 Tujuan Manajemen.....	12
2.1.4 Definisi Aset	13

2.1.5	Manajemen Aset	17
2.1.6	Siklus Manajemen Aset	22
2.2.	Penelitian Terdahulu	24
2.3.	Kerangka Berpikir	34
BAB III METODE PENELITIAN		36
3.1.	Jenis Penelitian	36
3.2.	Definisi Konseptual	37
3.3.	Fokus Penelitian	38
3.4.	Jenis dan Sumber Data	41
3.4.1.	Data Primer	41
3.4.2.	Data Sekunder	41
3.5.	Informan Penelitian	42
3.6.	Teknik Pengumpulan Data	44
3.6.1.	Wawancara	44
3.6.2.	Observasi	45
3.6.3.	Dokumentasi	45
3.7.	Teknik Analisis Data	45
3.8.	Jadwal Penelitian	47
3.9.	Sistematika Penulisan	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		50
4.1.	Gambaran Umum Instansi	50
4.1.1.	Visi dan Misi Instansi	50
4.1.2.	Struktur Organisasi	51
4.2.	Informan Penelitian	52
4.3.	Hasil Penelitian	53

4.3.1. Analisis Alur Inventarisasi Aset pada Kendaraan Dinas Operasional oleh BPKAD Kota Palembang	54
4.3.2. Analisis Alur Legal Audit pada Kendaraan Dinas Operasional oleh BPKAD Kota Palembang.....	67
4.3.3. Analisis Alur Penilaian Aset pada Kendaraan Dinas Operasional oleh BPKAD Kota Palembang.....	76
4.3.4. Analisis Optimalisasi Aset pada Kendaraan Dinas Operasional oleh BPKAD Kota Palembang.....	81
4.3.5. Analisis Alur Pengawasan dan Pengendalian Aset Kendaraan Dinas Operasional oleh BPKAD Kota Palembang.....	91
4.4. Hasil Pembahasan	99
BAB V PENUTUP.....	112
5.1. Kesimpulan.....	112
5.2. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	xvii
LAMPIRAN	xix

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Total Kendaraan Dinas Kota Palembang Tahun 2023.....	4
Tabel 2. Kendaraan Dinas Operasional Ubah Kondisi Kota Palembang....	5
Tabel 3. Penelitian Terdahulu	25
Tabel 4. Fokus Penelitian	39
Tabel 5. Informan Penelitian yang di Perlukan	43
Tabel 6. Jadwal Penelitian.....	48
Tabel 7. Informan Penelitian	52
Tabel 8. Jumlah Kendaraan Dinas Perhubungan	63
Tabel 9. Spesifikasi Kebutuhan	64
Tabel 10. Data Kelayakan Fisik Kendaran yang Berpotensi.....	84
Tabel 10. Data Kelayakan Fisik Kendaran yang Berpotensi.....	85
Tabel 11. Data Kendaraan yang akan diHapuskan	89
Tabel 12. Matriks Temuan Penelitian	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perkembangan Manajemen Aset	18
Gambar 2. Alur Manajemen Aset	19
Gambar 3. Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar 4. Model Analisis Data Interaktif.....	46
Gambar 5. Struktur Organisasi BPKAD Kota Palembang.....	51
Gambar 6. Rekonsiliasi Konfirmasi Data Kendaraan Dinas	58
Gambar 7. Identitas Pembeda Kendaraan Dinas Operasional.....	61
Gambar 8. Spesifikasi Kendaraan Dinas.....	65
Gambar 9. Data Manual Pengamanan Aset.....	70
Gambar 10. Data Pengamanan Hukum BPKB Kendaraan Bermotor	75
Gambar 11. Berita Acara Hibah Kendaraan Dinas	80
Gambar 13. Proses Penghapusan Kendaraan Dinas operasional	90
Gambar 14. SIMDA BMD	96
Gambar 15. Tampilan Awal E-BMD.....	97
Gambar 16. Tampilan Home E-BMD Yang memuat berbagai menu	97
Gambar 17. Tampilan Menu Inventarisasi E-BMD	98
Gambar 18. Wawancara Bersama Informan I₁	xx
Gambar 19. Wawancara Bersama Informan I₂	xx
Gambar 20. Wawancara Bersama Informan I₄.....	xx
Gambar 21. Wawancara Bersama Informan I₃	xx
Gambar 22. Wawancara Bersama Informan I₆₋₁.....	xx
Gambar 23. Wawancara Bersama Informan I₅₋₁.....	xx
Gambar 24. Wawancara Bersama Informan I₆₋₂.....	xxi
Gambar 25. Wawancara Bersama Informan I₇₋₁.....	xxi
Gambar 26. Wawancara Bersama Informan I₈.....	xxi
Gambar 27. Wawancara Bersama Informan I₉	xxi
Gambar 28. Wawancara Bersama Informan I₇₋₁.....	xxi
Gambar 29. Wawancara Bersama Informan I₅₋₂.....	xxi
Gambar 30. Wawancara Bersama Informan I₆₋₃.....	xxii
Gambar 31. Wawancara Bersama Informan I₅₋₄.....	xxii
Gambar 32. Wawancara Bersama Informan I₅₋₃.....	xxii

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah
BA	: Berita Acara
BPKB	: Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor
BMD	: Barang Milik Daerah
BMN	: Barang Milik Negara
BPKAD	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
E-BMD	: Elektronik Barang Milik Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
KIB	: Kartu Inventaris Barang
KJPP	: Konsultan Jasa Penilaian Publik
PP	: Peraturan Pemerintah
Perpres	: Peraturan Presiden
SIMDA-BMD	: Sistem Informasi Manajemen Daerah (Barang Milik Daerah)
SK	: Surat Keputusan
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
STNK	: Surat Tanda Nomor Kendaraan
KDO	: Kendaraan Dinas Operasional
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian
WDP	: Wajar Dengan Pengecualian
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Instansi	xxiii
Lampiran 2. Pedoman Wawancara Instansi Terkait.....	xxvii
Lampiran 3. Pedoman Observasi.....	xxviii
Lampiran 4. Pedoman Dokumentasi Instansi.....	xxix
Lampiran 5. Surat Izin Penelitian.....	xxx
Lampiran 6. Lembar Persetujuan Seminar Proposal	xxxii
Lampiran 7. Kartu Bimbingan Seminar Proposal	xxxiii
Lampiran 8. Kartu Perbaikan Seminar Proposal	xxxiii
Lampiran 9. SK Skripsi	xxxiv
Lampiran 10. Lembar Perbaikan Sidang Skripsi	xxxv
Lampiran 11. Bukti Turnitin UNSRI	xxxvi
Lampiran 12. Surat Keterangan Pengecekan Similarity Index	xxxvii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manajemen Aset merupakan serangkaian keputusan untuk mengelola suatu kekayaan secara efisien dan efektif, hal ini termasuk meminimalkan biaya kepemilikan, memaksimalkan penggunaan aset dan memaksimalkan ketersediaan. Pada dasarnya, manajemen aset merupakan tindakan dalam mengelola aset untuk memastikan bahwa setiap aset tetap hidup dan menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya dengan biaya sekecil mungkin (Herlinda, 2020).

Pengelolaan Aset atau Barang Milik Daerah merupakan salah satu pengelolaan di lingkungan pemerintahan daerah, guna mendukung pelaksanaan pemerintah daerah yang akuntabel, efektif, tertib, efisien, dan maka diperlukan adanya pengelolaan Barang Milik Daerah.

Permendagri No. 17 Tahun 2007 menjelaskan bahwa aset daerah merupakan barang daerah. Barang daerah sendiri merupakan segala bentuk kekayaan dalam daerah yang dimiliki maupun dikuasai, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali surat dan surat berharga lainnya.

Menerapkan pengelolaan Barang Milik Daerah tidaklah mudah karena nilai dan jumlah Barang Milik Daerah yang sangat besar, serta cakupan keberadaannya

yang sangat luas menjadi tantangan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (Syaifudin et al, 2020). Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam peraturan tersebut disebutkan pada Pasal 2 bahwa: 1) Pemanfaatan; 2) Pengamanan dan pemeliharaan; 3) Penilaian; 4) Pemindahtanganan; 5) Pemusnahan; 6) Penghapusan; 7) Penatausahaan ; 8) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; Merupakan bagian dari pengelolaan barang milik daerah yang berkesinambungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sondakh et al (2023) menunjukkan hasil bahwa Barang Milik Daerah akan terpengaruh bila proses inventarisasi tidak berjalan sesuai permendagri. Penelitian lain yang dilakukan oleh Lahada (2021) menunjukkan hasil bahwa apabila pengamanan aset kurang maksimal maka akan mempengaruhi manajemen aset. Penelitian yang juga dilakukan oleh Susiloadi (2023) yang mengatakan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam manajemen aset daerah. Pendapat lain oleh Lumingkewas & Supit (2023) yang mengatakan bahwa penyusunan RKBMD lah yang menjadi hal utama dalam pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik, sedangkan penelitian oleh Tua & Sujianto (2023) menemukan bahwa pengelolaan barang milik daerah tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ahli.

Permasalahan utama dalam pengelolaan aset daerah (*municipal asset management*) adalah proses administrasi yang tidak tertib dalam pengendalian inventarisasi aset (Wardhana, 2020). Inventarisasi merupakan unsur penting dalam proses pengelolaan Barang Milik Daerah. Inventarisasi dapat dikatakan sebagai pangkal dari pengelolaan barang, dimana inventarisasi memuat kegiatan atau

tindakan dalam melakukan penghitungan fisik barang milik daerah, memperkuat keyakinan kebenaran kepemilikan, dan menilai kondisi barang daerah dengan wajar.

Proses pengelolaan aset tidak hanya dilakukan begitu saja, akan tetapi juga dipertanggungjawabkan kebenaran datanya dalam Laporan Hasil Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dimana laporan ini akan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan proses penilaian dari LKPD setiap daerah. Sistem Penilaian laporan dilakukan oleh tim penilai sekaligus tim pemeriksa. Hasil penilaian yang diberikan BPK dikenal dengan nama Opini Badan Pemeriksa Keuangan.

Penilaian Opini BPK terhadap pertanggungjawaban pengelolaan aset daerah ini telah berlangsung sejak tahun 2004. Kota Palembang merupakan salah satu yang memberikan laporan tersebut kepada BPK, dalam kurun 2 tahun terakhir Kota Palembang mengalami peningkatan penilaian opini (LKPD), pada tahun 2022 Kota Palembang mendapatkan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan tahun 2023 berhasil mengalami kenaikan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meski penilaian Kota Palembang sudah mendapatkan nilai Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan belumlah cukup membuktikan manajemen aset Kota Palembang sudah baik, hal ini dikarenakan BPK hanya memeriksa dari segi laporan keuangannya saja. Sam halnya kendaraan dinas, BPK hanya melihat data rekapitulasi keuangan dari aset berupa kendaraan dinas tersebut.

Kendaraan Dinas sendiri adalah kendaraan bermotor yang merupakan bagian dari Barang Milik Daerah/Negara kendaraan tersebut digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya. Pemerintah Daerah melakukan pengadaan kendaraan dinas Jabatan dan Kendaraan Operasional untuk menunjang kegiatan operasional pemerintah yang terdiri dari kendaraan dinas Pejabat, Kendaraan Dinas Operasional Kantor/lapangan dan kendaraan dinas Bus.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang merupakan instansi pemerintah daerah yang secara keutuhan bertanggung jawab dalam hal pengelolaan Barang Milik Daerah termasuk kendaraan dinas operasional. Pada tahun 2023 Kota Palembang memiliki total kendaraan dinas operasional sebanyak tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima kendaraan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Total Kendaraan Dinas Kota Palembang Tahun 2023

Klasifikasi	Keterangan	Jumlah
Kendaraan Dinas Roda 2	Motor	1935
Kendaraan Dinas Roda 3	Bemo, Bentor	75
Kendaraan Dinas Roda 4	Mobil Dinas, Ambulance, Minibus	1265

Sumber: Diolah penulis dari data Penatausahaan Aset (BPKAD) 2023

Berdasarkan hasil observasi awal dan data yang ditemukan oleh peneliti pada 27 Agustus 2024, di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Palembang, peneliti menemukan masalah penting untuk mendukung penelitian ini, yaitu:

Permasalahan administrasi dalam kegiatan inventarisasi dan koordinasi dalam proses legal audit pengamanan kendaraan dinas operasional Pemerintah Kota Palembang yang kurang berjalan dengan baik.

Tabel 2. Kendaraan Dinas Operasional Ubah Kondisi Tahun 2023 Kota Palembang

Nama SKPD	Nama Barang	Kondisi
Dispendukcapil	Sepeda Motor	Rusak
Dinas Kesehatan	Sepeda Motor	Rusak
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sepeda Motor	Rusak
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mobil Jenazah	Rusak
Kecamatan Ilir Timur Satu	Sepeda Motor	Rusak
Kecamatan Ilir Timur Tiga	Sepeda Motor	Rusak
Kecamatan Jakabaring	Sepeda Motor	Rusak
Kecamatan Seberang Ulu Satu	Mobil Jenazah	Rusak
Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI	Mobil Ambulance	Rusak
Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI	Mobil Jenazah	Rusak
Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI	Mini Bus	Rusak
Kesatuan Pol PP Kota Palembang	Sepeda Motor	Rusak

Sumber: Diolah penulis dari data Penatausahaan Aset (BPKAD) 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Meriyati, selaku Analis Kebijakan Bidang Penatausahaan Aset pada BPKAD Kota Palembang, serta data kendaraan

dinas operasional tahun 2023, ditemukan bahwa terdapat dua belas kendaraan dinas dalam kondisi rusak berat. Namun, angka ini hanya mencerminkan sebagian kecil dari total kendaraan dinas yang mengalami perubahan kondisi fisik. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak kendaraan dinas yang mengalami perubahan fisik tanpa adanya pelaporan resmi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada bagian inventarisasi aset BPKAD. Akibatnya, data pencatatan aset menjadi tidak lengkap dan tidak mencerminkan kondisi aktual kendaraan dinas yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palembang.

Ketiadaan laporan administrasi perubahan kondisi fisik kendaraan ini berdampak langsung pada efektivitas manajemen aset daerah. Dalam sistem pengelolaan aset, inventarisasi merupakan tahap awal yang berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh aset tercatat dengan benar, baik dari segi jumlah, kondisi, maupun nilai aset tersebut. Ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi di lapangan dapat menghambat proses perencanaan pemeliharaan, penghapusan, maupun optimalisasi aset kendaraan dinas. Selain itu, kurangnya koordinasi antara SKPD sebagai pengguna aset dan BPKAD sebagai pengelola aset memperburuk permasalahan pencatatan ini, sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi dalam penggunaan kendaraan dinas.

Selain permasalahan dalam inventarisasi fisik kendaraan, terdapat pula kendala terkait pengamanan legalitas kepemilikan kendaraan bermotor dinas. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen, ditemukan bahwa masih terdapat SKPD yang belum menyerahkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada BPKAD selaku pengelola aset daerah. Padahal, keberadaan BPKB sangat penting dalam menjamin legalitas kepemilikan aset kendaraan dinas dan

menjadi bagian dari proses legal audit serta inventarisasi yuridis yang dilakukan oleh BPKAD.

Keterlambatan atau ketidaktertiban dalam penyerahan dokumen kepemilikan ini menimbulkan sejumlah dampak negatif. Pertama, proses audit legal yang bertujuan untuk memastikan bahwa aset kendaraan memiliki status hukum yang jelas menjadi terhambat. Kedua, tanpa adanya BPKB di bawah kendali pengelola aset, risiko kehilangan atau penyalahgunaan kendaraan dinas menjadi lebih besar, baik dalam bentuk penggunaan yang tidak sesuai ketentuan maupun potensi kepemilikan ganda yang tidak tercatat dalam sistem inventarisasi. Ketiga, hambatan dalam inventarisasi yuridis berimplikasi pada kesulitan dalam proses penghapusan atau pemindahtanganan aset di kemudian hari, karena status hukum kendaraan tidak dapat diverifikasi dengan cepat dan akurat.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis merasa tertarik untuk memperoleh gambaran lebih jauh tentang Manajemen Aset Kendaraan Dinas Operasional Kota Palembang. Maka judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah "Manajemen Aset Kendaraan Dinas Operasional Oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang."

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Manajemen Aset Kendaraan Dinas Operasional Oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang?.

1.3. Tujuan

Didasari oleh rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Manajemen Aset Kendaraan Dinas Operasional Oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dijabarkan, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman tentang Manajemen Aset Kendaraan Dinas Operasional Oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang, serta sebagai bahan pengembangan teoritis ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu administrasi publik.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai media informasi tambahan mengenai Manajemen Aset Kendaraan Dinas Operasional Oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J., Hasan, W., & Djarangkala, A. (2021). Penyusutan Aset Tetap Kendaraan Bermotor. *Gorontalo Accounting Journal*, 4(2), 197-206.
- Asep, K. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Khoirun, Wahyuni. (2020). *Pengantar Manajemen Aset*. Makassar: CV. Nas Media Pustaka.
- Lahada, G. (2021). Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 16(1), 34-42.
- Lumingkewas, E., & Supit, B. F. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa. *Academy of Education Journal*, 14(2), 1106-1116.
- M. Yusuf, C. H. (2023). *Teori Manajemen*. Solok: Yayasan Pendidikan Cendikia.
- M. Yusuf, Cecep Haryoto, Nazifah Husainah, Nuraeni. (2023). *Teori Manajemen*. Solok: yayasan pendidikan cendekia.
- Maharani, Utoto, Sulistio. (2020). *MANAJEMEN ASET PEMERINTAH DAERAH*, 386-387.
- Montayop, R. K. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap. 85.
- Nama, I. K., Suharsih, S., Astuti, R. D., & Rahayu, A. (2020). Pengelolaan Aset Daerah.
- Siregar, D. D. (2004). *Manajemen Aset*. Jakarta: Satya Graha.
- Suawah, P. W. (2021). Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh. *Jurnal Pemerintah*, 3.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: AlfaBeta, CV.

Suwanda & Rusfiana. (2022). *Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.” Accessed August 19, 2024.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/137669/permendagri-no-19-tahun-2016>

“Peraturan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.” Accessed August 18, 2024.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/196220/permendagri-no-47-tahun-2021>

“Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.” Accessed August 15, 2024.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/5464/pp-no-27-tahun-2014>

Tumilantouw, K. N. W., Tinangon, J. J., & Walandouw, S. K. (2024). Analisis penatausahaan inventarisasi barang milik daerah berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 pada Bapenda Kota Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 156-164.